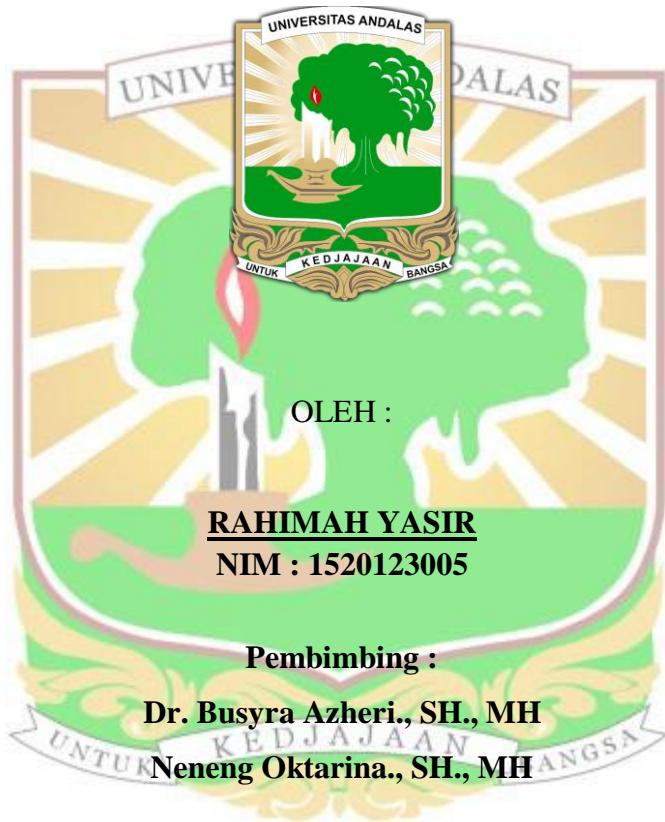


**PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PDT.G/2017/PA.PP)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Strata 2 (S2)

Program Studi Magister Kenotariatan



Pembimbing :

Dr. Busyra Azheri., SH., MH

Neneng Oktarina., SH., MH

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

**PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 78/PDT.G/2017/PA.PP) “**

Rahimah Yasir, NIM. 1520123005, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019, 100 Halaman

ABSTRAK

Anak merupakan titipan Allah SWT yang sangat luar biasa untuk orang tua, oleh karena itu orang tua mempunyai hak penuh untuk mendidik, mengasuh, menjaga serta memenuhi kebutuhannya sejak kecil sampai dia beranjak dewasa. Anak yang belum dewasa diwajibkan berada dalam kekuasaan orang tua, namun ada waktunya kekuasaan orang tua itu dicabut oleh pengadilan agama karena kelalaian atau kealpaan orang tua dalam mengurus anak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal; ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk sekali, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus Putusan No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP), bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (studi kasus Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.PP).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan dilakukan dengan *field research* (wawancara) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua diantaranya adalah problematika ini telah terjadi pada anak-anak dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, orang tua yang digugat adalah orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak dan berkelakuan buruk sekali, penggugat yang telah mengajukan diri sebagai wali telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu telah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terdapat pada Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Pencabutan, Kuasa, Hak, Anak

**“ REVOCATION OF PARENT POWER ON A CHILD REVIEWED FROM ACT OF
MARRIAGE NUMBER 1 YEAR 1974
(A CASE STUDY OF VERDICT NO: 78/PDT.G/2017/PA.PP) “**

Rahimah Yasir, NIM. 1520123005, Master of Notarial Law Postgraduate Program,
Faculty of Law, Andalas University, Padang, 2019, 100 pages

ABSTRACT

A child is a really special gift for parents from God, Allah SWT. Parents have an absolute right to educate, to nurture, to take care, and to fulfill child's need until the child grows to become an adult. Before growing up, the child is under his parent power. However, sometimes power of parents is revoked by religious court because of negligence of parents in caring the child. It is stated in Article 49 of Act Number 1 Year 1974 that power of mother or father or both of them could be revoked in certain time based on the will of other people or child's relatives or child's sibling or authorized officials by referring to court decision. The power is revoked because parents are negligence in fulfilling their responsibility or they do the bad things. Although the power is revoked, the parents still have responsibility to give financial support to the child. Based on the explanation above, problems to be discussed in this thesis are factors which cause the revocation of parent power on children reviewed from Act Number 1 Year 1974 (a case study of Verdict No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP), and law consideration of panel of judges in giving judgement about revoking parent power on a child (a case study of Verdict No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP).

Method of approach in this research is empirical, which means that secondary data was investigated first before primary data in the field was researched. Specification in this research is descriptive. Method of data collection are field research (interview) and library research. Result of the research shows that among factors which influence the cause of revoking parent power are: it occurs on children under 18 years and they are not married yet, parents are prosecuted because of their negligence in fulfilling their responsibility and doing really bad thing, and prosecutor meets criteria to be a guardian based on applicable provision. Judge consideration in giving judgement is that parents has broken the elements of marriage which is stated in Article 47 and Article 49, Act Number 1 Year 1974.

Keywords: Revocation, Power, Right, Children.